

SURVEI ATAS PERSEPSI STAKEHOLDER

Latar Belakang:

- Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau masih perlu meningkatkan budaya anti korupsi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan Survei:

- Mengetahui persepsi *stakeholder* tentang **budaya anti korupsi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan terhadap budaya anti korupsi** pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
- Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan Survei

Tanggal Pelaksanaan:

- 5 – 11 September 2017

Populasi:

- Semua OPD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau/Kota/Kabupaten

Sampel:

- 8 OPD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau/Kota/Kabupaten. Total jumlah sampel sebanyak 48 OPD

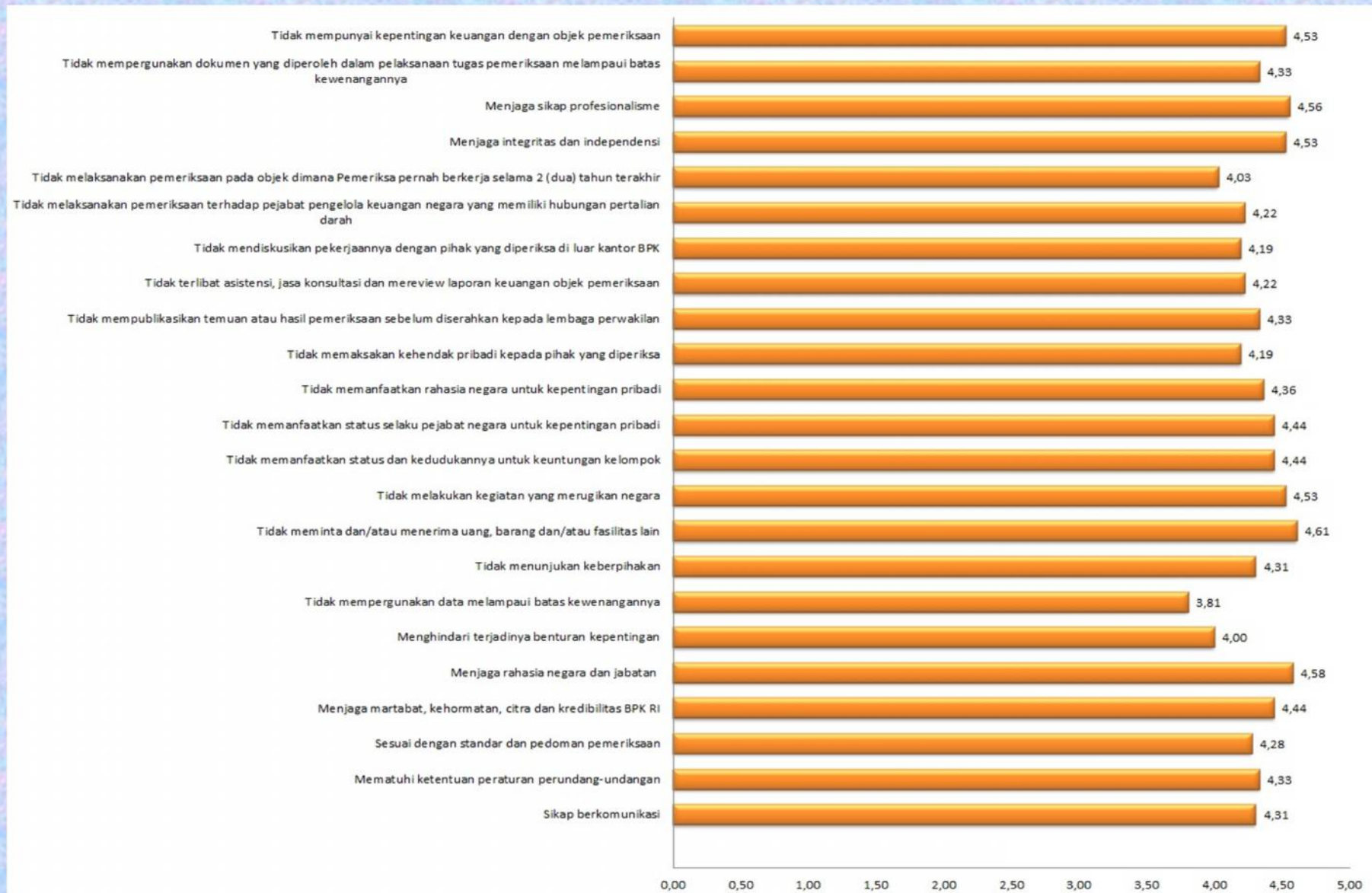
Responden:

- 36 responden (75%) dari sampel

Teknik Survei:

- Menyebarkan kuesioner kepada sampel via *email*

Grafik 1. Hasil Survei Atas Persepsi Stakeholder terhadap Budaya Anti Korupsi



Grafik 2. Hasil Survei Atas Persepsi Stakeholder terhadap Pengembangan Kelembagaan Budaya Anti Korupsi



Penilaian	Skala
Sangat puas	4,20 - 5,00
Puas	3,40 - 4,19
Kurang Puas	2,60 - 3,39
Tidak Puas	1,80 - 2,59
Sangat Tidak Puas	1,00 - 1,79

Ringkasan Hasil Survei (Tabel 1)

- Pada umumnya responden memiliki persepsi **puas** sampai dengan **sangat puas** terhadap **budaya anti korupsi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan** pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
- Dari 23 poin pertanyaan, ada 2 poin yang perlu menjadi perhatian karena mendapat nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan poin penilaian yang lain yakni:
 - Pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan menghindari terjadinya benturan kepentingan (4,00)
 - Pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan tidak menggunakan keterangan, bahan, data, informasi atau dokumen lainnya yang diperoleh pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya (3,81)

Ringkasan Hasil Survei (Tabel 2)

- Hasil survei menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau perlu menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan *awareness* para *stakeholder* atas **pengembangan kelembagaan terhadap budaya anti korupsi**
- Dari 7 poin pertanyaan, terdapat 3 poin dengan penilaian **kurang puas** yakni:
- Mengetahui adanya layanan pengaduan melalui website BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (3,39)
- Mengetahui adanya Majelis Kehormatan Kode Etik BPK(3,36)
- Mengetahui adanya Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk mempermudah tindak lanjut temuan pemeriksaan (3,36)

Action Plan

Untuk meningkatkan budaya anti korupsi dan *awareness stakeholder* atas pengembangan kelembagaan terhadap budaya anti korupsi, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengarahan Kepala Perwakilan terkait komitmen bersama dalam berupaya menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan, penegakan integritas, penguatan independensi dan peningkatan profesionalisme
- Penerapan kode etik BPK secara konsekuen
- Diseminasi SIPTL berkelanjutan